



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MELAPORKAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan transparansi dan komitmen bagi penyelenggara negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1527);
 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1221)

10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- KESATU : Menetapkan penyelenggara negara di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
- a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- KETIGA : Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



MATAMIRA BANGNGU KALE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB
MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

No	Nama dan NIP	Jabatan	Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Matamira B. Kale, S.Si, M.Si. 197007211991122001	KEPALA	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2	Septiana Safitri, S.Si. 198109142009022010	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3	Ni Made Trisya Puspita Devi, A.Md.Kb.N. 199912012022012002	BENDAHARA	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4	Rosalia Raesita Rabu S.H. 198110312011012006	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
5	Faridah Kasim, S.E. 198304152011012015	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
6	Rico Ade Putra Lay, S.Ak. 200007222022031001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
7	Fortje A. Elizabeth Non, S.P. 198101162010032001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
8	Alberth Christian Lulan, SST, M.Si 197202101992031002	KEPALA	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT

9	Serafina M. Roswitha Tampung, SST 199309252016022001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT
10	Heribertus Rivaldi De Lahut, A.Md.Stat 200002282021041001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT
11	Tri Ratna Ningtyas Arumsari, SST. 199311242016022001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT
12	Saudur Irsani H. Sibarani, SE, M.S.E. 198001202002122004	KEPALA	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR
13	Trisetiawan Talibura Tubulau S.Kom 198702052010031001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR
14	Simon Tay Ngunjutalu, A.Md 198311102011011012	BENDAHARA	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR
15	Sulastri F. Selan, S.Si 198509082010032001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR
16	I Made Suantara, SE, M.Si 19730710 199401 1 001	KEPALA	BPS KABUPATEN KUPANG
17	Nikolas Anova, SST., M.Sc. 19911010 201412 1 001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN KUPANG
18	Julio Christian Wadu Doko, A.Md.Stat 19980713 201912 1 001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN KUPANG
19	Rafael A Mau S.P 197108292006041001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN KUPANG
20	Marselinus Christoforus Koten, SE 196705241994011001	KEPALA	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
21	Johny Pello, S.P 19780622 201101 1 004	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

22	Angraini Mutiara Bawa, A.Md.Stat 19980824 201912 2 002	BENDAHARA	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
23	F. Henny Ika Rosanti, S.E 198310042011012013	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
24	Ir. Pieter Dikson R. Balukh 196712151994021001	KEPALA	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
25	Egidius Imanuel Laka, SE, M.Si 198204082010031001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
26	Yestiani Dasilva Nepa Fay, S.Si. 198406042011012013	BENDAHARA	BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
27	Ramly Kurniawan Tirtokusumo, SP, MAP 196907091994021001	KEPALA	BPS KABUPATEN BELU
28	Agus Sofiana, SST 198608202012112001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN BELU
29	Stanis Laus Bere Loe 197203191994031002	BENDAHARA	BPS KABUPATEN BELU
30	Septia Magdalena, SST 198909252012112001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN BELU
31	Mangiring Situmorang, SE, M.Si 196903131994011001	KEPALA	BPS KABUPATEN ALOR
32	Agnes Pora Niron SP 196906261994012001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN ALOR
33	Diah R. M. Sindopong 198805292008012001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN ALOR
34	Windi Wulandari, S.Si. 199308212022032013	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN ALOR
35	Muhamad Sukin, SST, M.Stat 198710192010121004	KEPALA	BPS KABUPATEN LEMBATA

36	Yustinus Laba, SE 19840601 201101 1 014	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN LEMBATA
37	Ainayya Hilwah Salsabila N. Likur, A.Md.Stat 20000213 202201 2 004	BENDAHARA	BPS KABUPATEN LEMBATA
38	Leonard Risalis Lalang, S.Si 198307302010031001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN LEMBATA
39	Feliksia Penaten Kelo Siola, SP 19690727 199402 2 001	KEPALA	BPS KABUPATEN FLORES TIMUR
40	Fransiska Alda Setyani Beru Sembiring, SST 19940723 201802 2 001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN FLORES TIMUR
41	Maria Sumaryati Tolok, A.Md.Stat 19981114 201912 2 002	BENDAHARA	BPS KABUPATEN FLORES TIMUR
42	Aloysius Uje Kerans, SST 19711231 199401 1 001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN FLORES TIMUR
43	Kristanto Setyo Utomo, SST, M.Si 198402172007011003	KEPALA	BPS KABUPATEN SIKKA
44	Imelda Sandrawati Ambot, S.Si 198407022011012015	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN SIKKA
45	Juliana Marbun, A.Md 199507192022032013	BENDAHARA	BPS KABUPATEN SIKKA
46	Maria Carlin Bepsi Costa, SST 199311072016022002	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN SIKKA
47	Martinus Tulit Beni, SST, M.Si 197205181995121001	KEPALA	BPS KABUPATEN ENDE
48	Marthin Nosry Mooy, S.Si 199311152019031001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN ENDE

49	Rysma Dezryama Zoelni, A.Md.Stat 19971019 201912 2 001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN ENDE
50	Rahmawaty, SST 198110052006022001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN ENDE
51	Ivadia Elmina Patola, SST, MT 19870124 200912 2 002	KEPALA	BPS KABUPATEN NGADA
52	Rikhardus Yos Nahak Bria, SE 197303261994011001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN NGADA
53	Yuliana Djami, A.Md.Stat 199707052019122001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN NGADA
54	Agata Dionesia Endi, SST 199212072016022001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN NGADA
55	Yosef Danu, SSi 197009181993121001	KEPALA	BPS KABUPATEN MANGGARAI
56	Andreas Pati, SST 198805162010121004	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN MANGGARAI
57	Yosephina Ferda Lendo, A.Md.Stat 199804072019122002	BENDAHARA	BPS KABUPATEN MANGGARAI
58	Leksius Jeda, SE 197510251998031004	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN MANGGARAI
59	Yustinus Siga, A.St. 197208071994121002	KEPALA	BPS KABUPATEN ROTE NDAO
60	Max Kres Therik, S.P 198303022010031003	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN ROTE NDAO
61	Aliefa Maulidia Dzikrina S.Si. 199009302019032002	BENDAHARA	BPS KABUPATEN ROTE NDAO

62	Ikhe Suryaningrum, S.Pi., M.A.B. 197712112006042030	KEPALA	BPS KABUPATEN MANGGARAI BARAT
63	Dyonisius H. S. Jewaru, SST, M.Ec.Dev. 199310092016021002	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN MANGGARAI BARAT
64	Reni Aprilliya, SST 199504272018022001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN MANGGARAI BARAT
65	Abdul Rauf, S.Si 198212282010031003	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN MANGGARAI BARAT
66	Ir. Joke Ratna Christina, M.A.P. 196810151994012001	KEPALA	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
67	Vinondang M. G. A. Sinaga, S.Si 199604292019032002	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
68	Maria Regelinda Fallo, A.Md.Stat. 200202042023022001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
69	Jefri Paul Natara, A.Md. 198004292003121007	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
70	Angela Regina Maria Wea SST,M.Si. 197005291994012001	KEPALA	BPS KABUPATEN NAGEKEO
71	Welhelmina Oktaviani Ngobe S.Si. 198701052011012017	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN NAGEKEO
72	Laurensia Anjelina Tanggung, A.Md.Stat 199905052021042001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN NAGEKEO
73	Onny Fatimah, A.Md.Stat 20000311 202201 2 004	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN NAGEKEO
74	Ir. Sunarmi 196805281994012001	KEPALA	BPS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

75	Porkarius Tedasilva, S.E 198108122010031001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BPS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
76	Hery Wahyu, A.Md.Stat. 199808012023021001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
77	Imra Atil Husni, S.ST, M.Si 198612242009122004	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
78	Yonsi Fredik Lian, S.P 198605292010031001	KEPALA	BPS KABUPATEN SABU RAIJUA
79	Erastus Floribertus Nahak, A.Md.Stat 199907242021041001	BENDAHARA	BPS KABUPATEN SABU RAIJUA
80	Patrisius Tupen, SE 196804131993031001	KEPALA	BPS KOTA KUPANG
81	Nengsy Victoria Donggi, SE 198710272008012002	BENDAHARA	BPS KOTA KUPANG
82	Adelheid Mathilda Subanina Niron, SST 19930422 201412 2 001	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BPS KOTA KUPANG


 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 MATAMIRA BANGNGU KALE